

## Construction of Islamic Identity in Organizational Documents: A Study of Primary Sources on the Articles of Association of Islamic Organizations in Indonesia

Ahmad Mukafi<sup>1</sup> ✉, Muhammad Yusuf Marjani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

✉ [kafiahmadmukafi@gmail.com](mailto:kafiahmadmukafi@gmail.com)

### Abstract:

This study aims to examine the construction of Islamic identity within the Articles of Association and Bylaws (AD/ART) of Islamic mass organizations (Ormas) in Indonesia, focusing on three major organizations: Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, and Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Each of these organizations plays a significant role in Indonesia's socio-religious dynamics, and their AD/ART documents function as operational foundations while reflecting the core values upheld by the organizations. This research employs a qualitative method using a document analysis approach, with the AD/ART documents serving as primary sources, to explore how Islamic identity is constructed and articulated within organizational regulations. The main focus of this study is to understand how each Islamic organization formulates its perspective on Islam within its organizational structure and governing rules, and how this formulation influences their social interactions and positions within Indonesian society. The expected findings of this study include the identification of both differences and similarities in the construction of Islamic identity among NU, Muhammadiyah, and LDII, as well as their respective contributions to the dynamics of Islam in Indonesia across social, political, and cultural dimensions. This research is expected to contribute to a deeper understanding of the role of Islamic mass organizations in shaping Islamic identity and their broader influence on society.

**Keywords:** Islamic identity; status and bylaws; Islamic mass organization

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi identitas keislaman dalam dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi masyarakat (Ormas) Islam di Indonesia dengan fokus pada tiga ormas utama yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Setiap organisasi ini memiliki peran penting dalam dinamika sosial keagamaan di Indonesia dan dokumen AD/ART mereka berfungsi sebagai landasan operasional serta mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen terhadap AD/ART yang menjadi sumber primer untuk menelusuri bagaimana identitas keislaman dibangun dan diterjemahkan dalam peraturan

organisasi. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana setiap ormas Islam membentuk pandangan keislaman mereka dalam struktur organisasi dan aturan-aturan yang berlaku serta bagaimana hal tersebut memengaruhi interaksi sosial dan posisi mereka dalam konteks masyarakat Indonesia. Hasil penelitian yang diharapkan adalah terungkapnya perbedaan dan persamaan dalam konstruksi identitas keislaman antara NU, Muhammadiyah, dan LDII serta kontribusi mereka terhadap dinamika Islam di Indonesia dalam berbagai dimensi sosial, politik, dan budaya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman terhadap peran ormas Islam dalam membentuk identitas keislaman dan pengaruhnya terhadap masyarakat luas.

**Kata kunci:** identitas keislaman; AD/ART; ormas Islam.

## Abstrak:

### ملخص البحث:

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة بناء الهوية الإسلامية ضمن النظام الأساسي واللوائح الداخلية للمنظمات الجماهيرية الإسلامية (أورماس) في إندونيسيا، مع التركيز على ثلاث منظمات رئيسية: نهضة العلماء (NU)، المحمدية، وليمبغا دكواه إسلام إندونيسيا (LDII). تلعب كل من هذه المنظمات دورا مهما في الديناميات الاجتماعية والدينية في إندونيسيا، وتعمل وثائقها المتعلقة ب AD/ART كأساس تشغيلي مع عكس القيم الأساسية التي تدعمها المنظمات. يستخدم هذا البحث منهجا نوعيا باستخدام نهج تحليل الوثائق، حيث تعد وثائق AD/ART مصادر أولية، لاستكشاف كيفية بناء وصياغة الهوية الإسلامية ضمن اللوائح التنظيمية. يركز هذا النهج الرئيسي على فهم كيف تصيغ كل منظمة إسلامية منظورها عن الإسلام ضمن هيكلها التنظيمي وقواعدها الحاكمة، وكيف يؤثر هذا الصياغة على تفاعلاتها الاجتماعية ومواقعها داخل المجتمع الإندونيسي. تشمل النتائج المتوقعة لهذه الدراسة تحديد الاختلافات والتشابهات في بناء الهوية الإسلامية بين جامعة المسلمين والمحمدية وLDII، بالإضافة إلى مساهماتهم في ديناميكيات الإسلام في إندونيسيا عبر الأبعاد الاجتماعية والسياسية والثقافية. من المتوقع أن تساهم هذه الأبحاث في فهم أعمق لدور المنظمات الجماهيرية الإسلامية في تشكيل الهوية الإسلامية وتأثيرها الأوسع على المجتمع.

الكلمات الأساسية: الهوية الإسلامية؛ الوضع واللوائح الداخلية؛ التنظيم الجماهيري الإسلامي

## PENDAHULUAN

Lanskap keagamaan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran organisasi kemasyarakatan Islam yang telah mengakar sejak awal abad ke-20. Nahdlatul Ulama yang didirikan pada 1926, Muhammadiyah yang lahir pada 1912, serta Lembaga Dakwah Islam

Indonesia yang resmi berdiri pada 1972 dengan nama awal YAKARI, merupakan tiga aktor utama yang turut mendefinisikan corak keislaman Indonesia kontemporer. Ketiganya bukan sekadar perkumpulan religius, melainkan entitas sosio-politik yang mengoperasikan jaringan pendidikan, ekonomi, advokasi, hingga diplomasi keumatan. Setiap organisasi memiliki dokumen konstitutif berupa Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang berfungsi sebagai “document of self-definition”—instrumen formal yang merumuskan siapa mereka, untuk apa mereka ada, dan bagaimana mereka memandang Islam. Dokumen ini sering kali dianggap sebagai teks administratif belaka, padahal di dalamnya tersimpan konstruksi ideologis yang menentukan batas identitas, model keanggotaan, hingga orientasi gerakan jangka panjang. Pembacaan kritis terhadap AD/ART karenanya merupakan pintu masuk metodologis yang strategis untuk memahami formasi identitas keislaman dalam lapis dokumenter yang paling otoritatif.

Permasalahan muncul ketika kajian-kajian terdahulu cenderung menempatkan ormas Islam sebagai entitas tunggal yang dipahami melalui praktik lapangan, retorika tokoh, atau kebijakan responsif terhadap isu kontemporer. Pendekatan demikian, meskipun berharga, mengabaikan dokumen primer yang justru menjadi fondasi normatif organisasi. Akibatnya, diskursus akademik mengenai ormas Islam sering kali bersifat fenomenologis tanpa pijakan tekstual yang kuat, atau sebaliknya, terlalu deskriptif tanpa kerangka analitis yang memadai. Pertanyaan yang belum terjawab secara memuaskan adalah bagaimana ketiga ormas—yang sama-sama mengklaim sebagai representasi Islam Indonesia—mengkonstruksi identitas keislaman mereka dalam pasal-pasal AD/ART, dan bagaimana konstruksi tersebut menghasilkan tipologi keanggotaan serta orientasi gerakan yang berbeda. Tanpa pembacaan komparatif yang sistematis terhadap dokumen primer, perbedaan substantif antara NU, Muhammadiyah, dan LDII rentan direduksi menjadi sekadar perbedaan “gaya” atau “mazhab,” padahal akar perbedaannya bersifat struktural dan tertanam dalam arsitektur dokumen konstitutif masing-masing.

Secara teoretis, organisasi massa keagamaan dapat dipahami melalui beberapa kerangka klasik dan kontemporer. Max Weber menempatkan organisasi modern sebagai

produk rasionalisasi yang ditandai oleh hierarki, aturan tertulis, dan tipologi otoritas yang dapat dibedakan menjadi tradisional, karismatik, dan legal-rasional (Weber, 1978). Ferdinand Tönnies melengkapi pembacaan ini dengan distingsi *Gemeinschaft* (komunitas yang diikat oleh kebersamaan organik) dan *Gesellschaft* (asosiasi yang diikat oleh kepentingan rasional)—distingsi yang relevan untuk memahami bagaimana ormas Islam menegosiasikan tegangan antara ikatan keimanan dan birokrasi modern (Tönnies, 2001). Namun, kerangka klasik ini perlu diperluas dengan teori gerakan sosial baru (*new social movements*) yang dikembangkan Alberto Melucci. Melucci berargumen bahwa gerakan sosial kontemporer tidak lagi semata-mata didorong oleh kepentingan material, melainkan oleh produksi makna dan pemeliharaan identitas kolektif (Melucci, 1989). Dalam tulisannya *The Process of Collective Identity*, Melucci merumuskan identitas kolektif sebagai "definisi yang interaktif dan dibagi bersama, dihasilkan oleh sejumlah individu yang berkenaan dengan orientasi tindakan mereka serta medan kesempatan dan kendala tempat tindakan tersebut berlangsung" (Melucci, 1995). Dalam karyanya yang lebih matang, *Challenging Codes*, Melucci menegaskan bahwa gerakan sosial dalam masyarakat informasi beroperasi melalui kode-kode simbolik yang harus terus diproduksi dan dipertahankan (Melucci, 1996). Perspektif ini relevan karena AD/ART ormas Islam pada hakikatnya adalah kodifikasi formal dari kode simbolik tersebut, sebuah upaya melembagakan identitas kolektif dalam bentuk teks yang mengikat secara organisatoris.

Penelitian terdahulu mengenai ormas Islam Indonesia secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga arus utama. Pertama, kajian historis yang menelusuri asal-usul dan dinamika organisasi seperti karya Hefner mengenai Islam sipil dan demokratisasi Indonesia (Hefner, 2000). Kedua, kajian sosiologis-antropologis yang memetakan ekspresi keislaman di tingkat akar rumput sebagaimana dilakukan Fealy dan White dalam mengkaji religious life and politics di Indonesia (Fealy & White, 2008). Ketiga, kajian politik yang memotret manuver elit ormas dalam panggung nasional, termasuk analisis van Bruinessen tentang "conservative turn" dalam Islam Indonesia (van Bruinessen, 2013). Ketiga arus ini telah menghasilkan literatur yang kaya, namun jarang yang menempatkan AD/ART sebagai unit analisis utama. Artikel ini mengisi kekosongan tersebut dengan

menjadikan dokumen konstitutif sebagai sumber primer dan membaca ketiganya secara komparatif melalui kerangka konstruksi identitas Berger dan Luckmann yang dipadukan dengan analisis wacana Foucault. Pemaduan dua kerangka ini memungkinkan pembacaan yang sekaligus menjelaskan bagaimana realitas keislaman dikonstruksi secara intersubjektif dan bagaimana kekuasaan beroperasi melalui wacana yang termaterialisasi dalam pasal-pasal AD/ART.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi dokumen (*document study*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena karakter penelitian yang menekankan kedalaman pemaknaan dan interpretasi atas teks, bukan kuantifikasi atas variabel (Denzin & Lincoln, 2017). Creswell dan Poth menegaskan bahwa studi kualitatif paling tepat digunakan ketika peneliti hendak memahami konteks dan makna yang melekat pada fenomena sosial yang kompleks (Creswell & Poth, 2018). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari tiga ormas: AD/ART NU hasil Muktamar ke-33 di Jombang (2015), AD/ART Muhammadiyah hasil Muktamar ke-45 di Malang (2005), dan AD/ART LDII hasil Munas IX (2021). Sumber sekunder mencakup literatur akademik mengenai ormas Islam Indonesia, terutama karya Hefner, Fealy, Burhani, Nashir, Bush, Nakamura, dan van Bruinessen. Teknik analisis data menggunakan analisis dokumen (*document analysis*) sebagaimana dirumuskan Bowen, yang melibatkan tahap *skimming*, *reading*, dan *interpretation* terhadap teks dokumen (Bowen, 2009). Analisis isi (*content analysis*) versi Krippendorff digunakan untuk mengidentifikasi pasal-pasal kunci yang merepresentasikan basis teologis, tipologi keanggotaan, dan orientasi gerakan, kemudian dibaca melalui kerangka teori konstruksi identitas Berger-Luckmann dan analisis wacana Foucault untuk menggali muatan ideologis di balik rumusan tekstual (Krippendorff, 2018).

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (a) mendeskripsikan basis teologis dan akidah ketiga ormas sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal AD/ART; (b) menganalisis tipologi keanggotaan dan mekanisme internalisasi nilai organisasi yang berbeda di antara ketiganya; dan (c)

memetakan orientasi gerakan masing-masing ormas dalam kerangka yang melampaui dikotomi tradisionalisme-modernisme. Kebaharuan artikel ini terletak pada pembacaan komparatif yang sistematis terhadap dokumen primer ketiga ormas dengan pemaduan kerangka teoretis konstruksi sosial atas realitas, analisis wacana, dan teori gerakan sosial baru—sebuah kombinasi yang belum banyak diterapkan dalam studi antropologi agama di Indonesia. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memperkaya pemetaan akademik mengenai pluralitas ormas Islam Indonesia sekaligus menyediakan landasan tekstual bagi penelitian lanjutan yang lebih lapangan-oriented.

## PEMBAHASAN

### Basis Teologis dan Akidah sebagai Fondasi Identitas

Akidah dalam dokumen organisasi keagamaan bukan sekadar pernyataan keimanan, melainkan instrumen pembentukan batas simbolik (*symbolic boundary*) yang memisahkan “kami” dari “mereka” secara teologis sekaligus sosiologis. Dalam kerangka Berger dan Luckmann, basis akidah berfungsi sebagai *symbolic universe*—sistem makna yang melegitimasi seluruh tatanan institusional dan menjadikan realitas organisasi tampak objektif bagi para anggotanya (Berger & Luckmann, 1966). Foucault melengkapi pembacaan ini dengan menegaskan bahwa setiap wacana keagamaan yang tertulis dalam dokumen resmi sesungguhnya merupakan praktik kuasa: ia menetapkan siapa yang berhak berbicara, apa yang sah dianggap sebagai kebenaran, dan bagaimana subjek dibentuk melalui rezim pengetahuan tertentu (Foucault, 2002). Pembacaan komparatif terhadap muqaddimah dan pasal-pasal awal AD/ART NU, Muhammadiyah, dan LDII memperlihatkan bagaimana ketiganya merumuskan tiga *symbolic universe* yang berbeda meskipun sama-sama berpijak pada Islam.

Nahdlatul Ulama secara eksplisit mengikatkan diri pada paham Ahlussunnah wal Jamaah dengan rumusan yang spesifik secara mazhab. Muqaddimah AD NU menegaskan bahwa organisasi ini dibentuk oleh “para ulama Ahlussunnah wal Jama’ah Indonesia” untuk “mengamalkan ajaran Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jama’ah,” sementara Pasal 1 ART NU mensyaratkan anggota luar biasa untuk “menganut faham Ahlussunnah wal

Jamaah dan menurut salah satu Mazhab Empat” (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2015, Pasal 1) Penyebutan empat mazhab fikih ini bukan ornamen redaksional, melainkan penanda diskursif yang menempatkan otoritas keagamaan pada rantai transmisi ulama klasik. Bahkan dalam ART disebutkan bahwa anggota berhak “menjalankan tradisi dan adat-istiadat selama tidak bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jama’ah An-Nahdliyah,” yang menunjukkan bahwa konstruksi akidah NU secara sengaja mengakomodasi pribumisasi Islam (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2015, Pasal 1 Ayat 7). Dalam terminologi Berger-Luckmann, NU melakukan *legitimation* terhadap praktik lokal melalui kanopi suci Aswaja, sedangkan dalam perspektif Foucault, frasa “An-Nahdliyah” yang ditambahkan setelah Aswaja merupakan praktik diferensiasi diskursif yang membedakan NU dari kelompok-kelompok yang juga mengklaim Aswaja namun menolak tradisi.

Muhammadiyah merumuskan basis teologisnya secara berbeda. Pasal 4 AD Muhammadiyah hasil Mukhtamar ke-45 menyatakan: “Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah,” dengan “Muhammadiyah berasas Islam” sebagai ayat tersendiri (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2005, Pasal 4). Yang absen di sini adalah penyebutan mazhab. Konstruksi ini secara diskursif memposisikan Muhammadiyah pada tradisi *salafiyah-tajdidiyah* yang menempatkan rujukan langsung pada teks primer, sebagaimana diidentifikasi Nakamura sebagai karakteristik “Islam berkemajuan” Muhammadiyah sejak era K.H. Ahmad Dahlan (Nakamura, 2012). Penambahan kata “tajdid” pada AD baru menurut Burhani menandai pergeseran dari purifikasi semata menuju pembaruan pemikiran yang lebih dinamis (Burhani, 2010). LDII menempati posisi yang secara doktrinal paling terbuka namun secara historis paling rentan. AD LDII tidak menyebut mazhab maupun aliran teologi spesifik; Pasal mengenai keanggotaan hanya mensyaratkan calon anggota “beragama Islam, beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala” serta “setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945” (Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, 2021, Pasal Keanggotaan) Profil resmi LDII menegaskan organisasi ini bertujuan menjadi “wadah umat Islam untuk mempelajari, mengamalkan dan menyebarkan ajaran

Islam secara murni berdasarkan Alquran dan Hadis" (Lembaga Dakwah Islam Indonesia, t.t.)

Tiga rumusan tersebut menampilkan tiga strategi diskursif yang berbeda. NU mengkonstruksi identitas melalui *kontinuitas sanad*, Muhammadiyah melalui *otentisitas teks*, dan LDII melalui *generalitas konstitusional*. Generalitas LDII secara analitis menarik karena harus dibaca bersama jejak historisnya sebagai metamorfosis Yayasan Lembaga Karyawan Islam (YAKARI) dan LEMKARI yang berakar pada Darul Hadits/Islam Jamaah Nurhasan Ubaidah, yang menurut van Bruinessen sempat dilarang oleh Kejaksaan Agung pada 1971 (van Bruinessen, 1992). Ketiadaan penyebutan paham teologis tertentu dalam AD/ART pasca-1990 dapat dibaca sebagai apa yang disebut Foucault sebagai *strategi normalisasi*—mengubah identitas tertanda menjadi identitas tak bertanda agar dapat masuk ke dalam tatanan kewargaan resmi (Foucault, 1995). Dengan demikian, ketiga ormas menunjukkan bahwa konstruksi akidah dalam dokumen organisasi tidak pernah netral: ia merupakan medan tarik-menarik antara klaim ortodoksi, strategi legitimasi negara, dan diferensiasi internal komunitas Muslim Indonesia.

## Tipologi Keanggotaan dan Internalisasi Nilai Organisasi

Sistem keanggotaan dalam dokumen ormas berfungsi sebagai mekanisme sosialisasi sekunder yang menerjemahkan *symbolic universe* ke dalam praktik keseharian anggota. Berger dan Luckmann menekankan bahwa sosialisasi sekunder adalah proses internalisasi "sub-dunia" institusional yang melibatkan akuisisi pengetahuan peran beserta legitimasinya (Berger & Luckmann, 1966). Dalam konteks ormas Islam, pasal-pasal yang mengatur jenis anggota, syarat penerimaan, hak-kewajiban, hingga prosedur pemberhentian bukanlah teks administratif semata, melainkan teknologi pendisiplinan (*disciplinary technology*) dalam pengertian Foucault—mekanisme yang membentuk subjek melalui klasifikasi, pengawasan, dan ritus pengakuan (Foucault, 1995). Tiga ormas yang diteliti menampilkan tiga model tipologi keanggotaan yang masing-masing mencerminkan logika konstruksi identitas yang berbeda.

NU dan Muhammadiyah memiliki struktur keanggotaan yang secara formal mirip:

anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Namun, kemiripan ini menutupi perbedaan kualitatif yang signifikan. ART NU Pasal 1 mendefinisikan anggota biasa sebagai “setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, baligh, dan menyatakan diri setia terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,” tanpa syarat afirmasi mazhab atau pelatihan kaderisasi (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2015, Bagian ART Pasal 1). Keanggotaan NU bersifat *inklusif-kultural*: seseorang dianggap “warga nahdliyin” lebih karena partisipasi dalam tradisi keagamaan (tahlilan, ziarah, pengajian kitab kuning) daripada melalui mekanisme administratif yang ketat. Inilah yang oleh Fealy disebut sebagai “keanggotaan kultural” yang membuat basis massa NU sulit diukur secara presisi tetapi sangat besar secara sosial (Fealy, 2003). Muhammadiyah menempuh jalan berbeda. Pasal 4 ART Muhammadiyah mensyaratkan calon anggota biasa untuk “Warga Negara Indonesia beragama Islam,” berusia minimal 17 tahun atau telah menikah, “menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah,” “bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah,” serta “mendaftarkan diri dan membayar uang pangkal” (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2005, Bagian ART Muhammadiyah, Pasal 4 ayat (1)). Persyaratan administratif ini melahirkan apa yang disebut Hilman sebagai “keanggotaan terdaftar” yang bersifat *formal-organisatoris*, dilengkapi nomor baku Muhammadiyah sebagai instrumen identifikasi (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2005, Pasal 4 Ayat 1).

LDII memperlihatkan model yang paling distingtif. ART LDII membagi keanggotaan menjadi dua kategori vertikal: “Anggota Tetap, selanjutnya disebut Anggota” yang terdiri dari pengurus dan mantan pengurus, dan “Anggota Tidak Tetap, selanjutnya disebut Warga” yang adalah anggota yang “bersedia mengikuti kegiatan dakwah keagamaan dan pendidikan kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Organisasi” (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2005, Bagian ART Pasal 4 Ayat 1). Perbedaan ini bukan sekadar nomenklatur, melainkan arsitektur sosial yang membentuk dua lapisan internal dengan hak suara dan akses yang berbeda. AD LDII menyatakan bahwa “Kedaulatan Lembaga Dakwah Islam Indonesia berada di tangan Anggota,” yang dalam pembacaan ART berarti kedaulatan berada di tangan kelompok pengurus dan mantan pengurus, bukan

keseluruhan jamaah (Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, 2021, Bagian AD Pasal tentang Kedaulatan Organisasi). Dalam terminologi Foucault, struktur ini menciptakan *hierarki visibilitas*: warga berada dalam posisi yang terlihat oleh anggota, tetapi tidak sebaliknya. Hosen mencatat bahwa pola pengelolaan internal LDII memang cenderung *teritorial-jamaahis* dengan pengajian rutin sebagai mekanisme reproduksi nilai yang intensif (Hosen, 2005).

Perbedaan tipologi ini berimplikasi pada cara internalisasi nilai berlangsung. Pada NU, internalisasi terjadi melalui *habituasi tradisi* yang dimediasi pesantren dan kiai—Pasal 7 ART menjamin hak anggota mendapatkan “perlindungan diri dan keluarga dari pengaruh paham-paham yang bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jama’ah An-Nahdliyah,” yang menunjukkan bahwa NU memposisikan diri sebagai perisai akidah anggotanya (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2015, Bagian ART Pasal 7 ayat (1) huruf e). Pada Muhammadiyah, internalisasi berlangsung melalui *pengaderan formal* seperti Darul Arqam dan pelibatan dalam Amal Usaha Muhammadiyah (sekolah, rumah sakit, perguruan tinggi) yang secara struktural menjadi medan reproduksi nilai-nilai tajdid. Pada LDII, internalisasi terjadi melalui *pengajian intensif* dengan metode manqul yang menghubungkan anggota pada otoritas guru-jamaah secara berlapis. Mekanisme pemberhentian keanggotaan juga mencerminkan tingkat kekauan boundary masing-masing: NU memberhentikan anggota karena “mencemarkan dan menodai nama baik,” Muhammadiyah memiliki prosedur banding berjenjang hingga Pimpinan Pusat, sementara LDII menekankan keterikatan “secara formal maupun moral” yang menempatkan kepatuhan moral sejajar dengan kepatuhan organisatoris (Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, 2021, Pasal Kewajiban Anggota; Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2015, ART Pasal 5; Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2005, ART Pasal 4 ayat (9)–(10)). Dengan demikian, dokumen AD/ART tidak hanya mengatur siapa anggota, tetapi mendefinisikan *bagaimana seseorang menjadi muslim* dalam konteks organisatoris yang spesifik.

## Orientasi Gerakan: Tradisionalisme, Modernisme, dan Dakwah Sistematis

Wacana mengenai orientasi gerakan Islam di Indonesia telah lama didominasi dikotomi tradisionalisme-modernisme yang dirumuskan Geertz dan diperhalus Noer (Geertz, 1960). Namun, pembacaan terhadap AD/ART ketiga ormas menunjukkan bahwa dikotomi tersebut perlu ditambah dimensi ketiga: dakwah sistematis-jamaahis yang direpresentasikan LDII. Berger dan Luckmann menyebut proses ini sebagai *institusionalisasi*—pengulangan tindakan yang membentuk pola, lalu pola yang membentuk peran-peran yang dapat ditransmisikan lintas generasi (Berger & Luckmann, 1966). Foucault menambahkan bahwa setiap orientasi gerakan adalah *formasi diskursif* yang menetapkan apa yang dapat dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan dalam ruang tertentu (Foucault, 2002). Tiga ormas yang diteliti menampilkan tiga formasi diskursif yang berbeda mengenai cara umat seharusnya beragama dan bergerak.

Tradisionalisme NU termanifestasi paling jelas dalam Pasal yang mengatur tugas Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) untuk “melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan agama Islam yang menganut faham Ahlus Sunnah wal Jama’ah” (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2015, ART Pasal tentang Lembaga, huruf a). Kata kunci “pengembangan” menunjukkan bahwa NU tidak melihat dirinya sedang melakukan pembaruan atau pemurnian, melainkan mengembangkan tradisi yang telah mapan. Hal ini diperkuat oleh keberadaan Rabithah Ma’ahid al-Islamiyah (RMI) yang bertugas mengembangkan pondok pesantren, serta Lembaga Bahtsul Masail yang menjadi forum istinbath hukum dengan merujuk *kutub al-mu’tabarah*. Struktur kepengurusan ganda Syuriyah-Tanfidziyah, di mana Syuriyah memiliki wewenang membatalkan keputusan perangkat NU yang “bertentangan dengan ajaran Islam,” menempatkan ulama pada posisi epistemik tertinggi (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2015, Bagian ART Pasal tentang Tugas Pengurus Syuriyah ayat (3)). Konstruksi ini, sebagaimana dianalisis Bush, mereproduksi otoritas ulama tradisional melalui mekanisme organisasi modern—sebuah hibridisasi yang justru membuat NU adaptif terhadap modernitas tanpa kehilangan akarnya (Bush, 2009).

Modernisme Muhammadiyah, di sisi lain, secara eksplisit dirumuskan dalam pasal usaha yang mencakup "Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan" (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2005, Bagian AD, Pasal 7 ayat (1)). Frasa "segala bidang kehidupan" menjadi penanda diskursif bahwa Muhammadiyah memandang Islam sebagai sistem yang harus diaktualisasikan melalui institusi-institusi modern: sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan perguruan tinggi yang secara formal disebut Amal Usaha Muhammadiyah. Pasal 7 ART memerinci usaha tersebut hingga mencakup "penegakan hukum, keadilan, Hak Asasi Manusia," yang menempatkan Muhammadiyah pada posisi yang oleh Burhani disebut sebagai "modernisme reformis dengan agenda kemajuan" (Burhani, 2005). Tajdid di sini tidak dimaknai sebagai dekonstruksi tradisi, melainkan rekonstruksi praktik keislaman agar relevan dengan tantangan zaman. Inilah yang membuat Muhammadiyah, sebagaimana dicatat Nashir, mampu menjadi "ormas Islam terbesar kedua di dunia" dengan jaringan amal usaha yang menjangkau seluruh provinsi tanpa kehilangan basis ideologisnya (Nashir, 2010).

LDII menampilkan formasi diskursif yang khas dengan menjadikan dakwah sebagai *raison d'être* sekaligus metode organisasi. AD LDII Pasal 6 merumuskan tujuan organisasi sebagai upaya "meningkatkan kualitas peradaban, hidup, harkat dan martabat... yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa guna terwujudnya masyarakat madani" (Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, 2021, AD Pasal 6 tentang Tujuan). AD LDII juga menyebutkan adanya "Paradigma Dakwah" atau "Prinsip-prinsip Dakwah" yang "dituangkan dalam naskah tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar" (Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, 2021, AD Pasal tentang Paradigma/Prinsip Dakwah). Klausul ini secara struktural memberi LDII fleksibilitas untuk mengembangkan metodologi dakwah internal tanpa harus selalu mengubah AD, sebuah strategi yang berbeda dari NU dan Muhammadiyah yang merumuskan metode dakwah langsung dalam pasal-pasal utama. Hosen membaca pola ini sebagai jejak struktur jamaah yang diwarisi dari Islam Jamaah dengan penyesuaian institusional pasca-pelarangan 1971 dan rebranding 1990 (Hosen, 2016). Struktur kepengurusan LDII yang berjenjang dari Dewan Pimpinan Pusat hingga

Pimpinan Anak Cabang di tingkat kelurahan menunjukkan orientasi *dakwah sistematis-teritorial* yang berbeda dari pola tradisional NU maupun pola modernis Muhammadiyah (Sirry, 2013).

Sintesis ketiga orientasi ini memperlihatkan bahwa kategori tradisionalisme-modernisme yang lama dipakai untuk memetakan Islam Indonesia tidak lagi memadai. NU menampilkan *tradisionalisme adaptif* yang melestarikan otoritas ulama dalam kerangka organisasi modern. Muhammadiyah menampilkan *modernisme institusional* yang menerjemahkan tajdid melalui amal usaha. LDII menampilkan *dakwah sistematis-jamaahis* yang menggabungkan struktur birokratik dengan jaringan pengajian intensif. Ketiganya, dalam analisis Foucauldian, merupakan tiga *rezim kebenaran* yang sama-sama mengklaim ortodoksi Islam tetapi mengoperasikan logika diskursif yang berbeda. Dalam kerangka Berger-Luckmann, ketiganya berhasil mengobjektivasi *symbolic universe* masing-masing sehingga tampak alamiah bagi para anggotanya—dan justru pluralitas inilah yang menjadikan lanskap keislaman Indonesia tidak monolitik, melainkan terus bernegosiasi melalui dokumen-dokumen organisasi yang seakan-akan teknis namun pada hakikatnya sarat muatan ideologis.

## KESIMPULAN

Pembacaan komparatif terhadap AD/ART Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia menegaskan bahwa dokumen konstitutif ormas bukanlah teks administratif yang netral, melainkan arsitektur diskursif yang mengkonstruksi identitas keislaman secara tertanda dan terbedakan. NU mengkonstruksi identitas melalui kontinuitas sanad dengan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dan mazhab empat, mengoperasikan tradisionalisme adaptif yang mengakomodasi pribumisasi tanpa kehilangan otoritas ulama. Muhammadiyah mengkonstruksi identitas melalui otentisitas teks Al-Qur'an dan As-Sunnah, mengoperasikan modernisme institusional dengan Amal Usaha sebagai medan reproduksi nilai tajdid. LDII mengkonstruksi identitas melalui generalitas konstitusional yang menanggalkan penanda mazhabi, mengoperasikan dakwah sistematis-jamaahis dengan struktur teritorial

berjenjang dan pembedaan vertikal antara "Anggota" dan "Warga." Ketiganya membentuk tiga *symbolic universe* yang berbeda namun sama-sama sah dalam konteks Islam Indonesia.

Temuan ini memiliki dua implikasi teoretis yang signifikan. Pertama, dikotomi tradisionalisme-modernisme yang diwarisi dari Geertz dan Noer perlu diperluas untuk mengakomodasi formasi diskursif ketiga yang direpresentasikan LDII, yakni dakwah sistematis-jamaahis. Kerangka triadik ini lebih akurat memetakan pluralitas ormas Islam Indonesia kontemporer. Kedua, pemaduan teori konstruksi sosial Berger-Luckmann, analisis wacana Foucault, dan teori identitas kolektif Melucci terbukti produktif untuk membaca dokumen organisasi sebagai medan produksi makna yang aktif, bukan sekadar cerminan praktik lapangan. Identitas kolektif sebagaimana dirumuskan Melucci—sebagai definisi interaktif yang terus-menerus dinegosiasikan—termaterialisasi dalam pasal-pasal AD/ART yang menjadi kode simbolik organisasi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada fokus dokumenter yang tidak menjangkau praktik lapangan secara langsung. Penelitian lanjutan dapat memperdalam temuan ini dengan etnografi pada masing-masing ormas untuk menelusuri jarak antara teks AD/ART dan praktik aktual anggota. Studi diakronik atas perubahan rumusan pasal lintas Muktamar/Munas juga dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika identitas ormas dalam merespons perubahan zaman. Selain itu, perluasan ke ormas Islam lain seperti Persatuan Islam (Persis), Al-Irsyad, atau Jam'iyatul Washliyah akan menghasilkan peta yang lebih komprehensif. Pada akhirnya, AD/ART terbukti merupakan jendela yang sangat berharga untuk memahami bagaimana Islam Indonesia diformalkan, dikodifikasi, dan dipertahankan sebagai identitas kolektif yang plural namun saling melengkapi dalam mosaik kebangsaan.

## REFERENCES

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Anchor Books.

- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Burhani, A. N. (2005). The Muhammadiyah's Attitude to Javanese Culture in 1912–1930: Appreciation and Tension. *Studia Islamika*, 12(3), 329–365.
- Burhani, A. N. (2010). *Muhammadiyah Jawa*. Suara Muhammadiyah.
- Bush, R. (2009). *Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia*. ISEAS.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2017). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. SAGE Publications.
- Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia. (2021). *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII Hasil Munas IX Tahun 2021*. DPP LDII.
- Fealy, G. (2003). *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967*. LKiS.
- Fealy, G., & White, S. (2008). *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. ISEAS.
- Foucault, M. (1995). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Vintage Books.
- Foucault, M. (2002). *The Archaeology of Knowledge*. Routledge.
- Geertz, C. (1960). *The Religion of Java*. The University Of Chicago Press Chicago and London.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Hosen, N. (2005). Religion and the Indonesian Constitution: A Recent Debate. *Journal of Southeast Asian Studies*, 36(3), 419–440.
- Hosen, N. (2016). Islam, Anti-Cult Movements, and Religious Freedom in Indonesia. Dalam T. Lindsey & H. Pausacker (Ed.), *Religion, Law and Intolerance in Indonesia* (hlm. 215–230). Routledge.
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. SAGE Publications.
- Lembaga Dakwah Islam Indonesia. (t.t.). *Tentang LDII*. Diambil 11 Mei 2026, dari <https://www.ldii.or.id/tentang-ldii/>
- Melucci, A. (1989). *Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society*. Temple University Press.
- Melucci, A. (1995). The Process of Collective Identity. Dalam H. Johnston & B. Klandermans (Ed.), *Social Movements and Culture* (hlm. 41–63). University of Minnesota Press.
- Melucci, A. (1996). *Challenging Codes: Collective Action in the Information Age*.

Cambridge University Press.

- Nakamura, M. (2012). *The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town*. ISEAS.
- Nashir, H. (2010). *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*. Suara Muhammadiyah.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (2015). *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Hasil Mukhtamar ke-33*. PBNU.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2005). *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Keputusan Mukhtamar ke-45*. PP Muhammadiyah.
- Sirry, M. (2013). Fatwas and Their Controversy: The Case of the Council of Indonesian Ulama (MUI). *Journal of Southeast Asian Studies*, 44(1), 100–117.
- Tönnies, F. (2001). *Community and Civil Society*. Cambridge University Press.
- van Bruinessen, M. (1992). Gerakan Sempalan di Kalangan Umat Islam Indonesia: Latar Belakang Sosial Budaya. *Ulumul Qur'an*, III(1), 16–27.
- van Bruinessen, M. (2013). *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn"*. ISEAS.
- Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press.